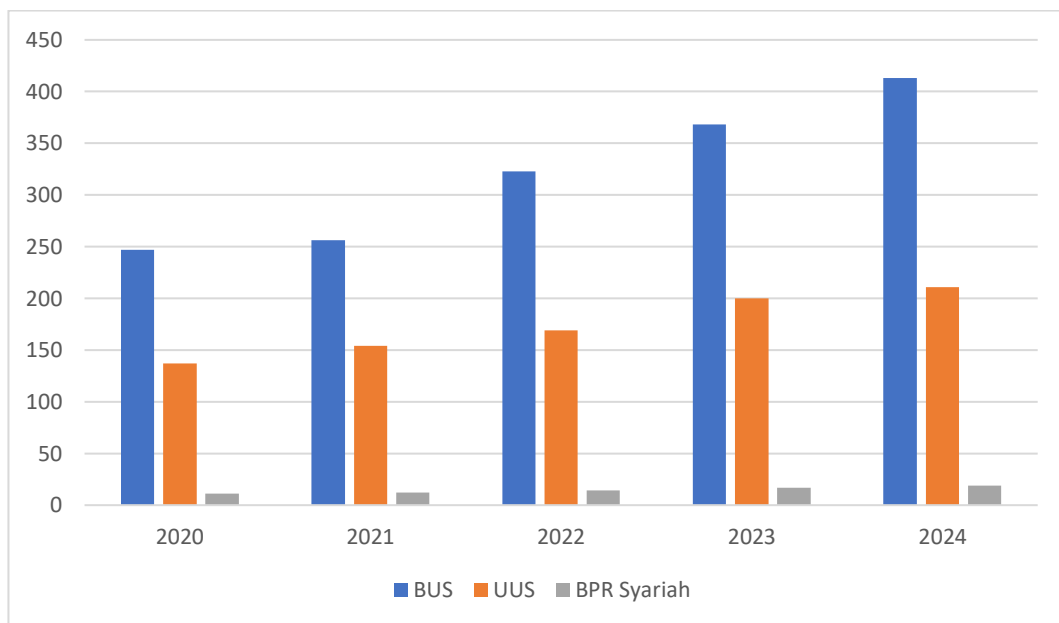


I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2024), jumlah penduduk muslim di Indonesia mencapai 87,2% atau lebih dari 200 juta jiwa. Kondisi ini menjadi peluang bagi pengembangan industri keuangan syariah. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2024) menunjukkan bahwa keuangan syariah yang ada di Indonesia mengalami perkembangan positif dalam lima tahun terakhir ditandai dengan adanya peningkatan jumlah penyaluran pembiayaan perbankan syariah. Perkembangan tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2024

Gambar 1.1

Perkembangan Penyaluran Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2020-2024

Peningkatan penyaluran pembiayaan perbankan syariah tersebut menunjukkan semakin besarnya peran lembaga keuangan syariah dalam mendukung aktivitas perekonomian nasional, khususnya dalam pembiayaan sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM). Peningkatan peran tersebut mendorong beragamnya kebutuhan UMKM terhadap produk keuangan syariah, namun produk yang tersedia belum sepenuhnya sesuai. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah mengembangkan berbagai produk, seperti tabungan syariah, pembiayaan mikro syariah, dan asuransi mikro syariah. Produk tersebut dirancang untuk memberikan alternatif layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip dasar

islam, terutama bagi masyarakat yang menjadikan nilai religius sebagai landasan kehidupan sehari-hari.

Dilihat dari data Kabupaten Bangkalan pada tahun 2024, jumlah penduduk muslim mencapai 1.040.606 jiwa dari keseluruhan jumlah penduduknya sebanyak 1.042.031 jiwa. Kondisi ini menjadi peluang besar dalam pengembangan keuangan syariah apabila dilihat dari kondisi masyarakatnya yang menjunjung tinggi nilai religius (Zakiyah & Dasion, 2023). Nilai religius yang kuat mendorong masyarakat lebih terbuka terhadap layanan keuangan berbasis syariah (Sehabudin, 2023). Walaupun peluangnya besar, potensi tersebut belum dapat dioptimalkan secara merata di seluruh wilayah Bangkalan. Khususnya pada wilayah pesisir, terdapat perbedaan karakteristik sosial dan ekonomi dibandingkan dengan masyarakat non pesisir. Mayoritas masyarakat pesisir menggantungkan hidup pada pekerjaan sebagai nelayan, pedagang hasil laut, maupun pelaku usaha mikro yang pendapatannya sangat dipengaruhi oleh kondisi alam, musim serta hasil tangkapan laut. Hal ini membuat pola konsumsi dan kebiasaan menabung masyarakat cenderung tidak stabil sehingga akses ke lembaga keuangan termasuk syariah, masih belum dimanfaatkan secara optimal.

UMKM pesisir di Bangkalan memiliki karakteristik berbeda dibandingkan dengan UMKM di wilayah non-pesisir. Perbedaan ini berimplikasi langsung pada akses dan pemanfaatan layanan keuangan, termasuk keuangan syariah. Menurut Prasetyo & Kamil (2023), UMKM yang ada di Pantai Biru cenderung berorientasi rumah tangga, yang mengalami keterbatasan modal serta literasi digitalnya terbilang rendah. Kondisi ini menjadikan pelaku UMKM bergantung pada sumber pembiayaan informal yang dianggap lebih cepat dan mudah daripada lembaga keuangan formal. Selain itu, penelitian Utomo *et al.* (2023) menunjukkan bahwa UMKM pesisir didominasi oleh sektor pengolahan hasil laut seperti pembuatan kerupuk ikan, kerupuk udang, kerupuk kerang, petis, dan terasi yang umumnya berskala kecil dan bersifat musiman. Karakter usaha yang tidak stabil ini sering membuat pelaku UMKM ragu untuk mengakses pembiayaan syariah karena khawatir tidak mampu menjaga kelancaran angsuran. Meskipun UMKM pesisir telah mendapatkan pembinaan dari Dinas Koperasi terkait manajemen usaha dan keuangan, pemanfaatan layanan keuangan syariah masih terbatas. Hal ini dipengaruhi oleh budaya lokal Madura "*buppa'-bhabhu'-ghuru-rato*" yang menempatkan tokoh masyarakat dan pemerintah sebagai pihak yang sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Pola budaya tersebut dapat

memudahkan sosialisasi keuangan syariah ketika dilakukan oleh pihak yang dihormati. Hal yang sama juga, ketergantungan pada sumber informal membuat masyarakat enggan beralih ke produk keuangan formal.

Dilihat dari pelaku UMKM pesisir di Bangkalan menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran yang signifikan. Berdasarkan data yang dikutip dari (Utomo *et al.*, 2023) menunjukkan dari 130 pelaku UMKM di pesisir Selatan Bangkalan, mayoritas pelaku UMKM nya ialah perempuan sebanyak 89 orang yang bergerak pada sektor pengolahan hasil laut dan usaha rumah tangga. Meskipun kontribusinya terbilang strategis, perempuan pelaku UMKM pesisir di Bangkalan masih menghadapi keterbatasan dalam akses layanan keuangan syariah. Menurut Salsabilyana (2023), hambatan tersebut meliputi pendapatan keluarga yang tidak stabil, beban ganda antara rumah tangga dan usaha, rendahnya pengetahuan mengenai produk dan manfaat keuangan syariah, keterbatasan akses fisik ke lembaga keuangan, serta pengaruh budaya yang menempatkan perempuan sebagai pihak sekunder dalam pengambilan keputusan ekonomi keluarga. Meskipun lembaga keuangan syariah telah hadir di Kabupaten Bangkalan, tingkat inklusi keuangan masyarakatnya masih tergolong rendah (Kurniawan & Gitayuda, 2021). Banyak pelaku usaha kecil di wilayah pesisir yang lebih memilih mengandalkan sumber permodalan dari keluarga ataupun lembaga keuangan informal karena dianggap lebih mudah diakses. Rendahnya pemahaman mengenai manfaat tabungan, pembiayaan maupun asuransi syariah membuat masyarakat kurang percaya diri untuk mengakses layanan formal.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan antara potensi besar UMKM pesisir dengan keterbatasan akses terhadap layanan keuangan syariah. UMKM pesisir di Bangkalan berkontribusi nyata dalam menopang perekonomian keluarga dan daerah, serta telah menunjukkan kontribusi peran perempuan dalam aktivitas usaha. Namun, rendahnya literasi keuangan, keterbatasan akses permodalan, dan hambatan gender menjadikan akses mereka terhadap produk keuangan syariah sangat terbatas. Sejauh ini, berbagai penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada literasi keuangan atau preferensi masyarakat secara umum, sedangkan penelitian ini secara spesifik mengkaji terkait pertimbangan UMKM pesisir terhadap berbagai atribut produk keuangan syariah yang masih relatif jarang dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis preferensi pelaku UMKM pesisir di Kabupaten Bangkalan dalam memilih produk keuangan syariah, mengidentifikasi atribut produk yang paling

dipertimbangkan, serta menentukan kombinasi produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis, baik bagi pengembangan literatur maupun strategi Lembaga keuangan syariah dalam menjangkau pelaku UMKM pesisir.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Apa saja karakteristik pelaku UMKM pesisir Bangkalan dalam memilih produk keuangan syariah?
- 2) Kombinasi atribut produk keuangan syariah apa yang paling disukai oleh pelaku UMKM pesisir Bangkalan?
- 3) Bagaimana preferensi pelaku UMKM pesisir Bangkalan berdasarkan atribut yang menjadi pertimbangan dalam memilih produk keuangan syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini yaitu:

- 1) Untuk mengetahui karakteristik pelaku UMKM pesisir Bangkalan dalam memilih produk keuangan syariah.
- 2) Untuk mengetahui kombinasi atribut produk keuangan syariah yang paling disukai pelaku UMKM pesisir Bangkalan.
- 3) Untuk mengetahui preferensi pelaku UMKM pesisir Bangkalan berdasarkan atribut yang menjadi pertimbangan dalam memilih produk keuangan syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dapat memperkaya literatur mengenai keuangan syariah, khususnya yang berkaitan dengan perilaku dan preferensi konsumen di wilayah pesisir. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan atau dasar untuk penelitian berikutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dapat memberikan masukan bagi lembaga keuangan syariah dalam merancang produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan

masyarakat pesisir. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang mendukung pengembangan keuangan syariah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan tentang pentingnya pemanfaatan layanan keuangan syariah yang aman dan sesuai prinsip islam serta bermanfaat bagi keberlangsungan usaha.

1.4.3 Manfaat Bagi Peneliti Berikutnya

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan kajian mengenai preferensi konsumen terhadap produk keuangan syariah di wilayah pesisir. Temuan ini juga dapat diperluas dengan menambah penggunaan variabel lain atau menggunakan metode analisis yang berbeda untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif.